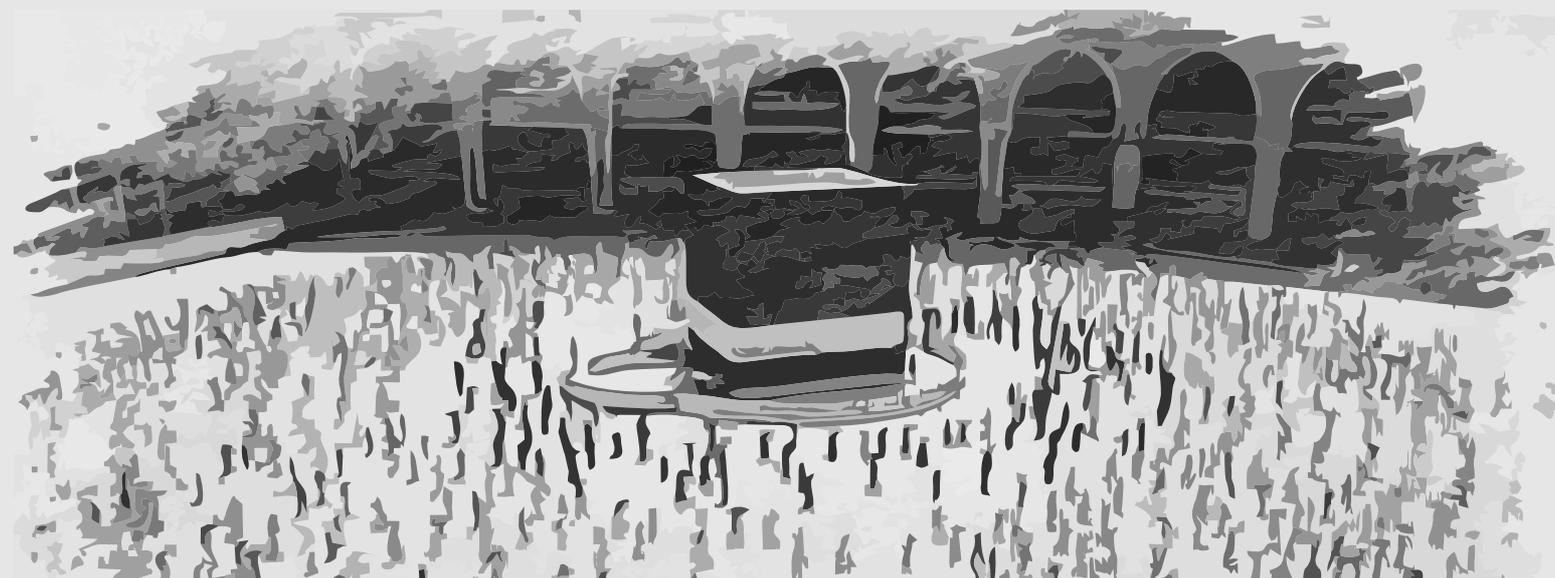


H A R I A N

LENTERA*Inspirasi Perubahan* **TODAY**

EDISI JUMAT / 30 Oktober 2020

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
SurabayaI want you guys, millennials, to
be agent of tolerance.
Perbedaan itu indah. Jangan
lupa tebarkan sikap positif,
karena kita satu IndonesiaRetno Marsudi,
Menteri Luar Negeri RI

33 RIBU JEMAAH **BATAL UMRAH,** TERSANDUNG SYARAT USIA



Pandemi Covid-19 yang telah menyerang dunia setengah tahun lebih memberi dampak besar di seluruh sendi kehidupan. Salah satu yang terimbas adalah ibadah umat Islam ke Tanah Suci. Meski kabar gembira hadir, karena Arab Saudi membuka kembali kedatangan jemaah umrah dari negara lain per 1 November 2020 nanti, tapi ternyata tidak semua muslim Indonesia yang sudah daftar bisa berangkat. Akibat persyaratan usia minimal 18 tahun dan maksimal 50

tahun, sedikitnya 33 ribu jemaah batal berangkat selama wabah corona belum teratasi. Kenaikan biaya juga dipastikan terjadi, karena adanya biaya tes bebas Covid dan pengaturan/pembatasan penumpang transportasi serta kamar hotel.

*Baca Hal 11***UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA**

	KASUS POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
INDONESIA	404,048	329,778	13,701
Seluruh Dunia	44,500,017	30,059,219	1,174,314

Update : 29 Oktober 2020 Pukul 16.12 PM
Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins**NASIB JEMAAH
UMRAH INDONESIA**

(Sesuai aturan pembatasan umur jemaah 18-50 tahun)

Jemaah bisa berangkat : 26.328 orang jemaah (44%)
Rincian : 21.418 jemaah sudah dapat nomor porsi dan 9.509 orang sudah lunas dan mendapatkan visa serta tiket keberangkatan.

Jemaah tidak bisa berangkat : 33.429 orang jemaah
Rincian:

- **Berusia di bawah 18 tahun : 2.601 orang Jemaah (4%)**
- **Berusia di atas 50 tahun : 30.828 orang Jemaah (52%)**

**SYARAT UMRAH
SAAT PANDEMI COVID-19**

- Bebas Covid-19
- Kamar diisi dua jemaah, jarak tempat tidur minimal 2 meter
- Pengurangan jumlah Jemaah di pesawat dan bus
- Tidak ada konsumsi dengan sistem prasmanan
- Usia maksimal 50 tahun, Minimal 18 tahun
- Mendaftar lewat aplikasi Itamarna

GAMANG KETIBAN WARISAN UTANG

Bagaimana rasanya dapat warisan? Biasanya sih senang. Tapi beda lagi kalau yang diwariskan utang, jadinya 'senep' (sakit perut). Itulah yang menjadi kekhawatiran negara Indonesia saat ini.

Baru saja kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, tonggak sejarah saat generasi muda bersumpah kepada negeri ini. Yaitu bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sayangnya, warisan utang malah di depan mata. Data terbaru, utang pemerintah per akhir September 2020, berdasarkan Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp 5.756,87 triliun.

Beberapa waktu lalu, Indonesia juga dinobatkan sebagai negara dengan utang terbanyak di Asia Tenggara (ASEAN). Bahkan menurut data Bank Dunia, negeri ini masuk 10 besar tepatnya nomor 7 negara pendapatan rendah menengah dengan utang terbesar di seluruh penjuru bumi.

Menurut hitungan kasar, dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 30 Juni 2020 jumlah rakyat sekitar 269 juta jiwa tepatnya 268.583.016 jiwa, dengan tanggungan pokok utang negara US\$402,08 miliar atau sekitar Rp 5.910 triliun (per Desember 2019), bila dibagi rata, maka setiap penduduk menanggung utang sekitar Rp 21 juta/orang. Itu belum ditambah beban bunga utang yang mencapai US\$ 12,04 miliar (Rp179,98 triliun). Dan itu juga belum melihat terus bertambahnya utang saat ini.

Tak dipungkiri, utang segunung itu memang digunakan untuk berbagai program pemerintah terkait penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19. Menurut data, dana yang disiapkan

Indonesia memerangi Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun atau USD 24 miliar. Jumlah ini cukup besar mencapai hampir 20 persen dari belanja nasional 2020 atau hampir 2 persen dari PDB.

Dana ini digunakan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif pajak, stimulus kredit hingga program pemulihan ekonomi. Dengan jumlah dana ini, Indonesia termasuk negara-negara yang mengalokasikan dana cukup besar untuk menangani wabah ini atau hampir 2 persen PDB.

Jumlahnya memang lebih rendah dibanding negara-negara maju. Misalnya Jerman yang mengalokasikan USD132 miliar, Perancis EUR45 miliar, Italia USD27 miliar atau Korea Selatan sebesar USD66 miliar. Dana yang digunakan Indonesia lebih besar dari Turki yang mengalokasikan USD15,4 miliar bahkan China yang mengalokasikan dana sebesar USD17,2 miliar.

Menyedihkannya jumlah utangnya terus menggelembung. Benarkah generasi muda akan diwarisi utang? Bila itu terjadi, tantangan penerus bangsa ini ke depan adalah mengangsur utang tanpa ujung. Ironis bukan.

Mengutip analisa ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), dengan struktur utang luar negeri yang didominasi utang berjangka panjang (88,8 persen), Indonesia memang akan mewariskan utang terbesar bagi generasi ke depan. Kondisi ini membuat anak-anak di masa depan harus menanggung utang yang diputuskan pemerintah hari ini, begitu mereka lahir. Pasalnya, pemerintah tiap lima tahun berganti, tapi beban utang harus tetap dibayar dan menjadi tanggungan generasi berikutnya.

Belum lagi, surat utang pemerintah Indonesia memakai dolar AS. Mengingat Rupiah lemah terhadap dolar AS maka berpotensi untuk risiko yang relatif tinggi terkait dengan nilai tukar. Fluktuasi Rupiah akan mempengaruhi nilai dari utang yang pemerintah harus bayar pada masa depan.

Utang luar negeri yang dicatat pada 2019 ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2015, utang asing Indonesia sebesar 307,74 miliar dollar AS, 2016 sebesar 318,94 miliar dollar AS, 2017 sebesar 353,56 miliar dollar AS, dan pada 2018 sebanyak 379,58 miliar dollar AS. Kendati demikian, peningkatan jumlah utang ini diikuti oleh peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB).

Apakah harus utang, apalagi ke investor asing?

Dalam struktur pembiayaan negara ada beberapa sumber dana yang dikenal selama ini. Di antaranya adalah dana pungutan bea ekspor sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dana lingkungan hidup di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) kemudian dana khusus yang dikelola Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

Indonesia juga mempunyai dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan jumlah sekitar Rp150 triliun. Selain itu juga ada cadangan devisa sejumlah USD 130 miliar yang dikelola oleh Bank Indonesia.

Kendati demikian, Kementerian Keuangan memastikan rasio ini masih tetap aman karena masih di bawah batas maksimal di Undang-Undang Keuangan negara. Mengacu UU 17/2013 tentang Keuangan Negara, memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60% dari PDB. Benarkah aman? Semoga! (*)



A. WIDYAWATI
REDAKTUR PELAKSANA LENTERATODAY

DPR PUN 'GALAU' SOAL TIDAK NAIKNYA UMP 2021

Jakarta-Terkait kebijakan tak naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2021, DPR RI tampak 'galau', tidak satu suara. Ada yang menyetujui dengan alasan agar tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tapi di sisi lain ada yang meminta dievaluasi ulang dengan melakukan musyawarah dengan pekerja dan mencari jalan tengah.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan kebijakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak menaikkan UMP 2021 perlu melalui musyawarah antara pekerja dan pengusaha terlebih dahulu.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu, dialog dan pembicaraan internal dalam semangat musyawarah mufakat antara pengusaha dan pekerja harus menjadi prioritas dan didahulukan untuk mencari solusi terbaik antara kedua pihak dengan atau tanpa fasilitasi pemerintah. "Hasil musyawarah menjadi pegangan bersama dalam melewati pandemi Covid-19 dengan baik," ujar Melki dikutip Kamis (29/10).

Melki mengatakan dapat memahami alasan Menaker membuat kebijakan tidak menaikkan UMP 2021 tersebut. Namun, menurut Melki, pemerintah juga mesti membuat kebijakan yang tepat dalam menjaga kesejahteraan pekerja di berbagai sektor tersebut. "Suka duka, untung rugi harus dibagi bersama antar-berbagai pihak terkait," kata Melki.

Terpisah, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, "Ya

memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi seperti ini adalah prioritas utama bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK."

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan jika masyarakat menuntut kenaikan upah maka hal itu sangat tidak bijak. Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak begitupun para perusahaan. "Nah dalam kondisi begini kalau ada kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga minus," katanya.

Oleh sebab itu, jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikkan upah minimum 2021 ini. Hal ini juga sekaligus untuk menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus Covid-19 ini. "Ya artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solitif, win win solution," ujarnya.

Beberapa kepala daerah pun menyuarakan pendapatnya. Gubernur Banten Wahidin Halim meminta agar buruh menerima keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah. Menurut dia, pandemi virus corona membuat pengusaha mengalami kesulitan sejak Maret 2020. "Jangan naik setiap tahun, karena perintah, keputusan Menteri itu harus sama kayak tahun lalu. Kalau setiap tahun naik, kesulitan pengusahannya, kondisinya lagi begini (pandemi)," ujar Wahidin. (Ist)

SANKSI UNTUK KEPALA DAERAH YANG TAK IKUTI SE-UMP

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 68 (Sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri)

- **Ayat 1:** "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota."
- **Ayat 2:** "Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan."
- **Ayat 3:** "Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah."

LANDASAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN UMP 2021

- UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Penetapan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

18 DAERAH BAKAL MENGIKUTI ATURAN UPAH MINIMUM 2021

- | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 1) Jawa Barat | 7) Kepulauan Riau | 13) Sulawesi Barat |
| 2) Banten | 8) Bangka Belitung | 14) Maluku Utara |
| 3) Bali | 9) Nusa Tenggara Barat | 15) Kalimantan Barat |
| 4) Aceh | 10) Nusa Tenggara Timur | 16) Kalimantan Timur |
| 5) Lampung | 11) Sulawesi Tengah | 17) Kalimantan Tengah |
| 6) Bengkulu | 12) Sulawesi Tenggara | 18) Papua |

KETUA DPRD SURABAYA: ANAK MUDA JANGAN GOLPUT

Surabaya- DPRD Kota Surabaya ingin anak-anak muda di Surabaya berperan aktif dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masa depan Kota Pahlawan. Untuk itu, sebagai refleksi semangat Sumpah Pemuda Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono berharap pemilih muda tidak Golput dalam Pilkada 2020 ini.

Adi mengatakan sejak era revolusi yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno, era reformasi tahun 1998, hingga kini era pembangunan berkelanjutan ala Presiden Joko Widodo, anak muda adalah simpul penting yang ikut mengembangkan negara Indonesia, begitupula di Kota Surabaya.

Sejak Walikota Surabaya Bambang DH

hingga kini Tri Rismaharini, sumber daya manusia (SDM) terbaik untuk memajukan kota adalah ada di para jiwa dan tubuh anak muda Surabaya. Apalagi, kini Kota Surabaya juga sedang mengusung reformasi digital. Maka peran anak muda dinilai sangat penting untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya.

"Persaingan digital itu kuncinya ada di anak-anak muda. Pengetahuan mereka jauh lebih cerdas dan tak takut bersaing dengan siapa pun. Anak muda itu tonggak sejarah. Maka dari itu, peringatan Hari Sumpah Pemuda itu sangat penting bagi pemuda masa kini dalam perjalanan bangsa," kata Awi sapaan akrabnya.



Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono

Awi mengatakan, sebagai tonggak pembangunan kota di masa depan, ia ingin adanya peran aktif para pemuda Surabaya di semua lini. Mulai dari politik, ekonomi, olahraga, pendidikan, hingga teknologi. Awi menuturkan, jika anak muda Surabaya apatis terhadap lini-lini penting di Surabaya, maka bisa dipastikan Surabaya tidak akan bisa bersaing dengan kota-kota di dunia. (Ist/Ard)

PENCEGAHAN COVID-19 SAAT LIBUR PANJANG

PEMKOT MADIUN AKTIFKAN LAGI POS PANTAU DI 5 PINTU MASUK

Madiun - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mengaktifkan kembali pos pantau di 5 titik pintu masuk Kota Madiun. Selain itu 150 personil aparat gabungan juga diterjunkan untuk memantau masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan (Protkes) selama cuti bersama dan libur Maulid Nabi Muhammad SAW Rabu (28/10) hingga Minggu (01/11).

Walikota Madiun Maldi membenarkan pos diaktifkan kembali untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Pos tersebut tersebar di Pahlawan Street Center - Madiun Lor, Te'an Demangan, PG. Redjo Agung - Patihan, Depan Uji KIR - Nambangan Lor, dan Terminal Sub Manisrejo. Setiap pos di jaga oleh 14 personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD dan PMI yang akan melakukan operasi prokes sewaktu-waktu.

"Lima titik pantau. Setiap pos 14 personil. Siapa yang masuk (Kota Madiun) harus melaksanakan protokol kesehatan," jelas Maldi di Kolam Renang Sentani, Kamis (29/10).

Selama libur dan cuti bersama, Maldi mengatakan Kota Madiun menjadi jujugan wisata. Di satu sisi ini menjadi kabar baik karena bisa menggerakkan roda ekonomi. Namun di sisi lain, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tersendiri apabila masyarakat tidak disiplin dalam penerapan Protkes. Ditakutkan Kota Madiun menjadi tempat



Walikota Madiun, Maldi

penyebaran Covid-19.

Ia membenarkan jika keberadaan kawasan Pahlawan Street Center (PSC) dan Taman Sumber Umis serta potensi wisata lainnya yang kini sedang dikembangkan pemkot disinyalir menjadi magnet penarik masuknya masyarakat ke Kota Madiun.

Wali Kota Maldi memprediksi ada puluhan ribu masyarakat yang masuk dalam libur panjang ini. Karenanya, diperlukan adanya tambahan petugas untuk mendisiplinkan masyarakat tersebut. "Kota kita diapit delapan kabupaten dengan sekitar 7 juta penduduk.

Kalau 20 persen dari itu masuk ke Kota Madiun, sudah ada 30 sampai 40 ribu orang. Ini tentu butuh penanganan lebih dari biasanya agar kasus COVID-19 tidak bertambah," katanya.

Maldi menegaskan, warga luar yang masuk Kota Madiun wajib mematuhi protokol kesehatan. Untuk pemeriksaan masker dilakukan secara berkala terutama di titik-titik keramaian. Ia menginginkan setiap orang yang masuk dan pulang dalam kondisi sehat.

"Penanganan Covid-19 di kota kita sudah cukup bagus. Ibu Gubernur juga memberikan apresiasi dan meminta ini dipertahankan. Libur panjang jangan sampai ada pe-lonjakan kasus lagi," katanya.

Dia juga tidak melarang apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan perjalanan libur ke luar kota. Dia hanya berpesan agar ASN yang keluar kota wajib ijin terlebih dahulu. Seusai berlibur, ASN diminta melakukan rapid test sebelum kembali bekerja. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19.

Maldi menambahkan, ASN yang tak mendapat izin dan tak menjalani rapid test Covid-19 saat kembali dari luar kota akan mendapat sanksi. Ia pun meminta para ASN menjalani rapid test di puskesmas terdekat saat kembali dari luar kota. "Kalau tidak sehat ya harus diisolasi dulu," ungkap Maldi. (ger)

SISWA DI KOTA BLITAR JADI INFLUENCER DAN SPEAKER PROTOKES CORONA

Blitar - Untuk membantu mencegah penyebaran Covid-19, selama libur panjang akhir minggu ini siswa di Kota Blitar dijadikan influencer dan speaker di beberapa pusat keramaian serta lokasi wisata. Pelajar yang duduk di SD dan SMP negeri ini diberi tugas membantu sosialisasi Protokol Kesehatan (Protkes).

"Para siswa SD - SMP Negeri se Kota Blitar, melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19, melalui gerakan 3 M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, di lokasi keramaian dan wisata," tutur Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Blitar, Priyo Suhartono, Kamis (29/10). Seperti diketahui liburan panjang kali ini memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama, 28 Oktober - 1 November 2020.

Dijelaskan Priyo kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai hari ini Kamis hingga Sabtu (29-31/10). Siswa yang menjadi influencer tersebut dipilih mewakili sekolahnya. "Karena bisa menjadi contoh, serta mempengaruhi orang lain untuk selalu disiplin menerapkan protkes pencegahan Covid-19. Bisa Duta Covid 3M atau dari komunitas sekolah bentuk lainnya," jelas pria yang juga menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar ini.

Sedangkan speaker lanjut Priyo, yakni menyampaikan sosialisasi melalui poster,



Duta Sosialisasi Pencegahan Covid-19 SMP Negeri 1 Kota Blitar di pasar legi

banner maupun pengeras suara. Mereka menyampaikan sosialisasi ke lokasi yang sudah ditentukan, serta dibagi per kelompok. "Jadi mereka membawa poster yang berisi imbauan 3M, atau menyampaikan melalui cara yang mereka inginkan. Bisa menari, menyanyi, puisi dan tulisan serta menggunakan pengeras suara atau musik juga boleh," paparnya.

Untuk siswa SD ditentukan di lokasi wisata wisata yaitu Taman Kebun Rojo, Makam Bung Karno dan Agrowisata Blimbing Karang Sari. "Dibagi 3 shif yaitu jam 09.00 - 10.00 dan 11.00 Wib, tiap kelompok bisa 5-10 orang," terangnya.

Sedangkan untuk siswa SMP, melakukan sosialisasi di 3 pasar yang ada di Kota Blitar. Yakni Pasar Templek, Pasar Pon dan Pasar Legi. Dengan waktu mulai jam 07.00 - 08.00 wib, karena pada jam tersebut keramaian di pasar biasanya terjadi.

Ditambahkan Priyo alasan mengajak siswa melakukan sosialisasi Protkes karena jika anak-anak yang mengajak penerapan disiplin 3M diharapkan lebih didengar dan diperhatikan. "Seharusnya orang dewasa atau orang tua juga harus bisa, disiplin untuk menerapkan 3M. Termasuk adanya potensi terjadi kerumunan orang atau pengunjung, selama libur panjang ini," pungkasnya. (ais)

PILKADA SURABAYA MEMANAS, PASLON SALING KLAIM UNGGUL DALAM SURVEI

Surabaya-Jelang debat publik dalam Pilkada 2020 Kota Surabaya, paslon Eri Cahyadi-Armuji dan Machfud Arifin-Mujiaman sama-sama mengklaim unggul berdasarkan hasil survei. Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur bakal menggelar tiga kali debat publik yakni pada 4 November, 18 November dan 5 Desember.

Pasangan nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji mengklaim unggul sebanyak 6,5%. Klaim itu berdasarkan hasil survei internal PDI-Perjuangan dan Pusat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham).

Akhir pekan lalu, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menghadiri konsolidasi di Surabaya mengatakan, pasangan Eri Cahyadi-Armuji unggul 6%. Menurut Hasto, keunggulan itu disebabkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang merupakan sosok pendulang suara bagi pasangan Eri-Armuji.

Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan Pusdeham, pasangan nomor urut 1 ini unggul 6,5 persen. Peneliti Pusdeham, Andik menjelaskan, survei dilakukan pada awal Oktober 2020 dengan jumlah responden 1.000 orang yang berasal dari seluruh kecamatan di Surabaya.

"Selain juga didongkrak figur Risma, pasangan ini juga solid didukung mesin PDI-P yang bergerak masif di seluruh kecamatan di Surabaya," kata Andik dikutip, Kamis (29/10).

Sementara pasangan nomor 2, Machfud Arifin-Mujiaman klaim unggul 20%. Direktur Komunikasi dan Media Tim Pemenangan Machfud Arifin-Mujiaman, Imam Syafi'i mengungkap hal itu berdasarkan hasil survei

internal yang dilakukan tim mereka. "Hasil survei internal kami dari lembaga Pol-tracking, pasangan Machfud Arifin - Mujiaman unggul 20 persen," katanya.

Ia menuding survei yang dilakukan pasangan Eri-Armuji tak sesuai fakta di lapangan. "Kalau pasangan nomor 1 unggul, mestinya Bu Risma bisa lebih tenang. Bukan malah banyak laporan dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan pasangan tertentu," ujarnya.

Pilkada Surabaya diikuti dua pasangan calon. Pasangan Eri Cahyadi-Armuji didukung PDI-P dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara pasangan Machfud Arifin-Mujiaman didukung delapan partai politik, yakni PKS, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN dan Gerindra.

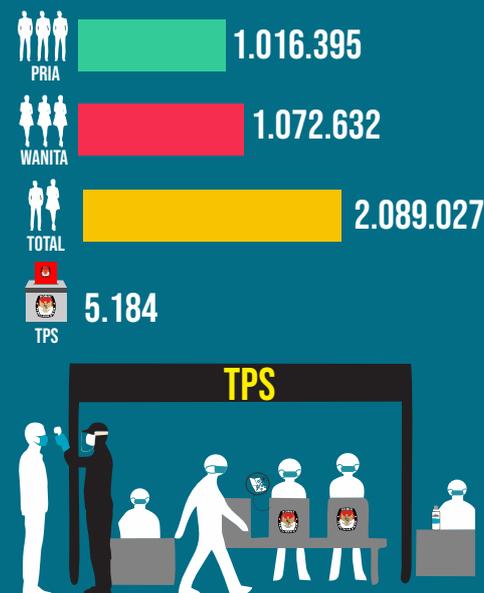
Usul Debat Tanpa Contekan

Terkait debat, tim pemenangan pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji mengusulkan debat perdana pilkada yang dijadwalkan pada 4 November 2020 tidak ada paslon yang membawa kertas contekan di atas panggung.

"Jika pasangan calon tidak membawa contekan materi data, masyarakat secara lugas dan orisinil menilainya," ujar tim penghubung pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji, Wimbo Ernanto. Menurut dia, masyarakat bisa melihat kualitas dan memahami seluk-beluk persoalan Kota Surabaya, termasuk masalah konsep secara mendetail serta solusinya, dilansir dari Antara.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Nur Syamsi, menjelaskan, "Rencananya debat publik akan

PILKADA KOTA SURABAYA 2020



digelar sebanyak tiga kali. Untuk debat pertama akan digelar pada tanggal 4 November 2020, kedua tanggal 18 November dan terakhir 5 Desember," katanya.

Dalam debat publik pertama pada 4 November nanti, pasangan calon akan beradu gagasan dalam tema 'Menyelesaikan Persoalan Daerah, Memajukan Daerah, dan Strategi Penanganan Covid-19'.

Pada debat kedua pada 18 November nanti, mereka akan beradu gagasan seputar Kesejahteraan Masyarakat. Kemudian pada debat ketiga 5 Desember mendatang, para paslon membahas seputar 'Mensinergikan Pembangunan Daerah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jatim, Pemerintah Pusat dan Memperkokoh NKRI'. (ist,ard)

PILBUP MALANG

PULUHAN RIBU MASKIN TAK MILIKI JAMIN KESEHATAN, SanDi ANDALKAN 'MAKIN TOBAT'

Malang- Calon Bupati Sanusi dan Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto (SanDi), memastikan masyarakat miskin (maskin) mendapatkan jaminan layanan kesehatan. Sanusi mengatakan jika inisiasi tersebut selaras dengan program unggulan Malang Makmur di sektor kesehatan. Mantan wakil bupati tersebut menjelaskan jika bantuan kesehatan nantinya masuk melalui program 'Makin Tobat' (Masyarakat Miskin Gratis Berobat).

"Jaminan program itu sudah ada di tahun depan. Mekanismenya sudah kita siapkan dalam program Makin Tobat," kata pria yang lekat disapa Abah Sanusi ini, Kamis (29/10).

Lebih lanjut Sanusi menjelaskan jika program kesehatan tersebut dibagi menjadi dua kategori. Yaitu kategori pertama masyarakat miskin yang mempunyai BPJS dan kedua masyarakat miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil pemetaan Sanusi selama kampanye, terdapat ada puluhan ribu

masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan BPJS Kesehatan. Mayoritas masyarakat miskin yang tak memiliki jaminan kesehatan tersebut hidup di kawasan pinggiran dan mereka hidup sebatang kara.

"Kalau masyarakat miskin yang punya BPJS kan sudah ditanggung (BPJS Kesehatan). Nah yang tidak punya BPJS itulah yang kita tanggung biaya pengobatannya di rumah sakit," ucap Sanusi. Masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS Kesehatan tidak banyak. Ya mungkin tidak sampai 20 ribu orang. Kebanyakan sudah dapat jaminan BPJS," ungkapnya.

Calon bupati asli Malang ini mengklaim, jika dana program Makin Tobat tersebut sudah dianggarkan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Malang sebesar Rp 70 miliar. Alokasi anggaran tersebut diajukan sesaat sebelum dirinya cuti sebagai Bupati Malang karena tuntutan kampanye. "Bagi warga miskin yang tidak memiliki NIK, cukup mengurus surat ke-



Salah satu calon Bupati Malang, Sanusi saat melakukan kegiatan dengan warga

terangan tidak mampu dari tingkat desa tempat mereka tinggal.

Mereka nanti akan diarahkan oleh Kepala Desa dan masyarakat setempat, agar bisa mendapatkan layanan kesehatan (Makin Tobat) melalui surat keterangan tidak mampu dari desa," tutup Sanusi. (Sur)

WISATA
AKHIR PEKAN
KELILING
ANTARIKSA
CUKUP DARI
DALAM RUMAH

Keterbatasan ruang gerak mendorong kreativitas dalam mencari hiburan untuk mengikis rasa bosan karena tidak bisa bepergian jauh selama beberapa bulan belakangan.

Wisata Kreatif Jakarta akhir pekan lalu membuat jalan-jalan virtual ke tempat yang berbeda dari biasanya: antariksa.

Para pelancong bersiap ke luar angkasa dan "berkumpul" lewat aplikasi Zoom, mendengarkan penjelasan pemandu mengenai serba-serbi perjalanan luar angkasa.

Untuk membantu informasi visual, foto-foto dan video menjadi bahan pendukung dari penjelasan pemandu.

Para pelancong virtual diajak ke tempat peluncuran roket Badan Antariksa Amerika Serikat sampai isi pesawat yang dipakai para turis ke antariksa, kehadiran SpaceX hingga Virgin Galactic membuat perjalanan ke luar angkasa untuk masyarakat awam bukan hal mustahil asal bisa merogoh kocek dalam-dalam.

Perjalanan ini diwarnai dengan serba-serbi informasi menarik seputar perjalanan ke luar angkasa, seperti tokoh fiksi Tintin yang lebih dulu mendarat di bulan sebelum

manusia menjejakkan kaki ke sana.

Pelancong juga diajak untuk mengenal astronaut perempuan Indonesia Pratiwi Sudarmono yang nyaris berangkat bila pesawat ulang-alik Challenger tidak mengalami kecelakaan.

Ilmuwan yang mewakili Indonesia dalam kerjasama dengan National Aeronautics and Space Administration (NASA), lembaga antariksa Amerika Serikat, ini rencananya pergi ke luar angkasa dengan pesawat ulang-alik Columbia pada 24 Juni 1986.

Namun misi itu dibatalkan karena pesawat Challenger meledak pada 28 Januari 1986, dalam waktu 73 detik setelah diluncurkan saat pesawat berada di ketinggian 15 kilometer.

Krisis moneter yang melanda Indonesia membuat astronaut Tanah Air tak lagi berpartisipasi dalam misi ke luar angkasa, sebab negara tak bisa membiayai program latihan astronaut.

Perjalanan ini membawa pikiran melayang ke Apollo 11, misi pendaratan manusia pertama di bulan yang meroketkan nama Neil Armstrong sebagai orang pertama yang menginjak bulan.

Selain Neil Armstrong, ada dua orang



Naskah / Foto-foto : Istimewa / nassa

lainnya yang pergi ke bulan, yakni Buzz Aldrin dan Michael Collins. Hanya Buzz Aldrin yang turun menyusul Neil Amrstrong, sementara Michael Collins berada di modul komando Columbia, mengelilingi bulan sebelum kembali menjemput dua rekannya kembali ke bumi.

Video percakapan via telepon antara Presiden Richard Nixon dan Neil Armstrong juga ditayangkan di wisata virtual pekan lalu.

Dalam wisata pekan lalu, dituturkan juga bahwa astronaut yang pergi ke bulan meninggalkan beberapa barang sebagai kenang-kenangan, seperti daun zaitun emas, plat audio berisi rekaman para pemimpin negara dunia, juga plakat orang-orang yang berjasa menyukseskan misi pengiriman manusia ke bulan.

Tertarik untuk pergi ke bulan?

Perjalanan dari bumi ke bulan dapat mencapai waktu tiga hari, tapi wisata secara virtual bisa dilakukan dalam beberapa puluh menit. Sembari menunggu pandemi Covid-19 berakhir, tur virtual yang menjamur belakangan ini dapat menjadi pilihan alternatif berwisata sambil bersantai di rumah (Ant).

STUDI: DONOR PLASMA TERNYATA KURANG EFEKTIF OBATI COVID-19



Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa pasien Covid-19 yang menerima plasma dari pasien yang pulih dari corona tidaklah menurunkan angka risiko kematian akibat penyakit tersebut.

Studi yang dilakukan oleh para peneliti di India dan dipublikasikan di "BMJ" meneliti 464 orang dengan Covid-19 sedang, artinya mereka adalah pasien dengan kadar saturasi oksigen 93 persen atau lebih rendah saat bernapas di dalam ruangan, kriteria jika seseorang yang terinfeksi SARS-CoV-2 harus dirawat di rumah sakit, karena itu saat di mana virus bisa menimbulkan penyakit.

Aparna Mukherjee, seorang ilmuwan epidemiologi dan penyakit menular di Dewan Riset Medis India, mencatat bahwa pasien dalam studinya kemungkinan akan dianggap sakit parah di negara lain, karena definisi penyakit sangat bervariasi di seluruh dunia.

Begitu sampai di rumah sakit, beberapa pasien dalam penelitian ini menerima dua dosis plasma penyembuhan dari mereka yang telah sembuh dari penyakit dan menyumbangkan darah kaya sel kekebalan mereka.

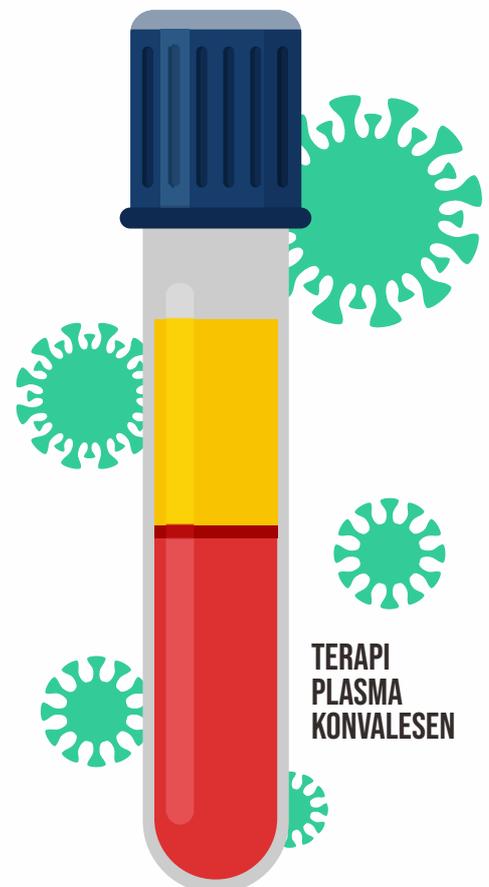
Dibandingkan dengan mereka yang dirawat dengan perawatan standar, pasien yang diberi plasma rupanya memiliki rerata kematian setelah 28 hari.

"Studi ini memiliki ukuran sampel yang besar dan menunjukkan bahwa ketika plasma diinfuskan pada pasien dengan Covid-19 sedang (serupa dengan yang parah di negara lain), itu tidak mengurangi kematian atau perkembangan menjadi Covid-19 yang lebih kritis," kata Aparna Mukherjee dikutip dari Time pada Senin.

Hasil studi ini menambah perdebatan berkelanjutan tentang seberapa berguna plasma penyembuhan kemungkinan bisa jadi pengobatan untuk Covid-19.

Plasma konvalesen adalah salah satu terapi tertua yang digunakan dokter dalam mengobati penyakit menular, berdasarkan gagasan bahwa orang yang terinfeksi dan pulih secara alami akan memiliki persediaan sel kekebalan yang tepat yang diperlukan untuk melawan virus atau bakteri tersebut.

Tetapi karena sistem kekebalan manusia sangat bervariasi, volume sel yang melawan penyakit juga tidak dapat diprediksi, dan dapat berkisar dari tingkat yang hampir tidak memadai hingga sumber sel kekebalan yang sangat kaya. Variabilitas tersebut menyebabkan hasil yang bertentangan pada keefektifan terapi, termasuk dalam penelitian ini, yang menggunakan plasma donor dari orang yang sakit selama rata-rata enam hari dengan apa yang penulis gambarkan sebagai penyakit ringan (Ant).



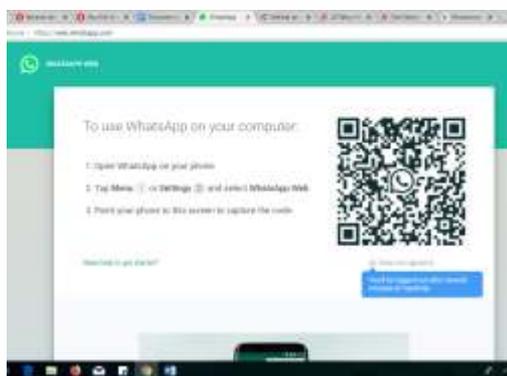


TANPA AKUN FACEBOOK, TETAP BISA VIDEO CALL LEWAT WHATSAPP WEB

Pengguna layanan pesan instan WhatsApp dapat melakukan panggilan video (video call) melalui WhatsApp Web atau layanan WhatsApp yang diakses melalui peramban desktop.

Sebelum ini panggilan video hanya bisa dilakukan melalui aplikasi WhatsApp di ponsel pintar berbasis Android maupun iOS saja. Hal yang sama berlaku pada panggilan suara (voice call).

Melansir laman resmi Whatsapp (Senin, 26/10/2020), pengguna Whatsapp Web kini



dapat melakukan panggilan video melalui WhatsApp Web dengan memanfaatkan Messenger Rooms dari Facebook

Bagi Anda yang tidak memiliki akun Facebook tak perlu khawatir. Karena layanan panggilan video di WhatsApp web tetap bisa dilakukan tanpa adanya akun Facebook.

Pembaruan versi 2.2043.7 menghadirkan jendela baru yang disiapkan khusus untuk menerima atau menolak panggilan suara yang masuk.

Selain itu, terlihat pula jendela lain yang berukuran lebih kecil untuk menginformasikan status panggilan. Jendela tersebut hanya akan muncul ketika panggilan sedang berlangsung.

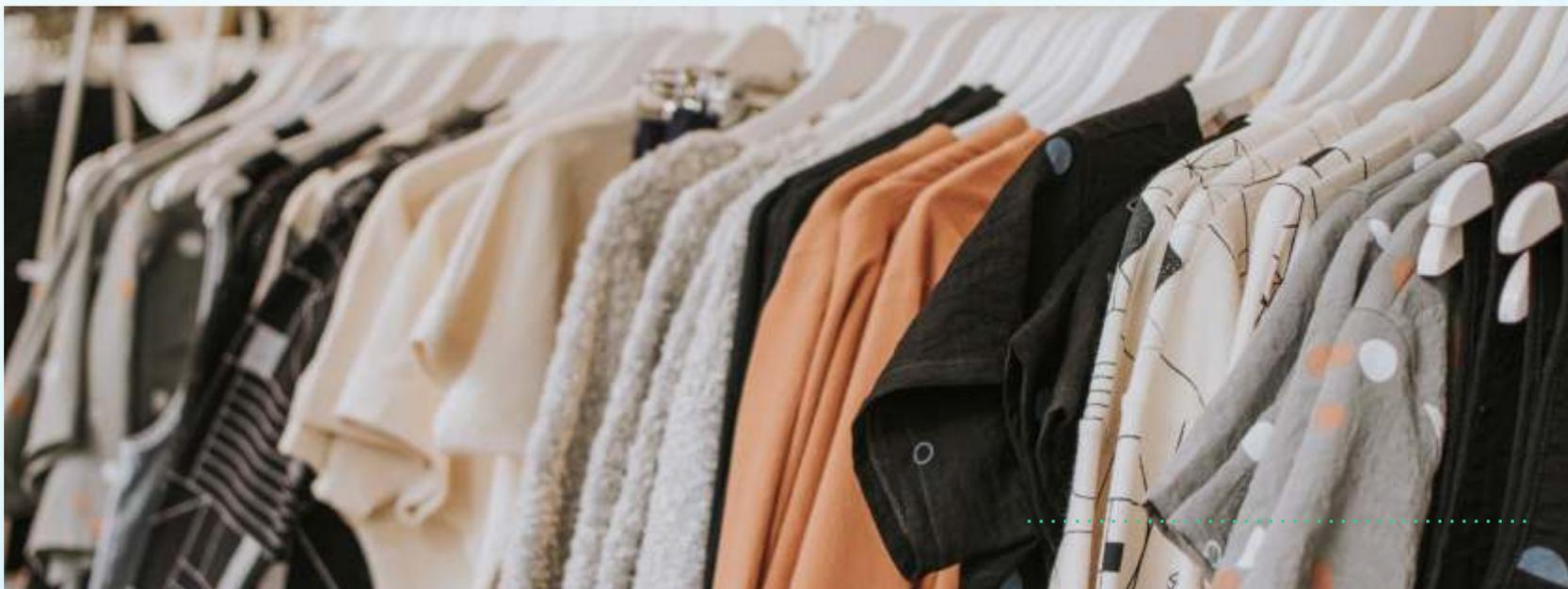
WhatsApp kabarnya juga akan menyertakan panggilan video pada fitur baru itu meskipun kemungkinan dihadirkan secara bertahap.

Fitur baru itu kabarnya juga akan hadir juga untuk Group. Tentunya hal tersebut membuat WhatsApp menjadi pesaing baru bagi layanan konferensi video seperti Zoom, Google Meets, Cisco Webex dan sebagainya (Ist).

LANGKAH UNTUK MELAKUKAN PANGGILAN VIDEO DI WHATSAPP WEB:

- Pertama, buka aplikasi Whatsapp di laptop/komputer, atau akses laman WhatsApp Web di peramban.
- Buka obrolan individu atau grup, klik 'Lampiran' atau ikon bergambar klip kertas), kemudian klik 'Room'.
- Pengguna akan diarahkan di Messenger. Klik 'Lanjutkan di Messenger'. Setelah itu, pengguna akan dialihkan ke situs web Messenger dan klik 'Lanjutkan'.
- Pilih 'Buat Forum sebagai {Nama}'. Kemudian layar akan memberikan tautan.
- Kirimkan tautan link dan kirim ke individu atau grup yang ingin dikontak untuk memulai panggilan video.





Tren Fesyen Wanita : Gaya Kasual Mendominasi

Foto : Lauren Fleischmann/unsplash

Tren fesyen dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan sekaligus juga perkembangan. Tak hanya dari segi bentuk dan model, perubahan gaya hidup juga memengaruhi makna atau pesan dari pakaian itu sendiri.

Ambil contoh pada tahun 2020 ini, akibat kehadiran pandemi Covid-19, hampir seluruh negara mengimbau warganya untuk selalu

menggunakan masker saat keluar rumah. Masker pun jadi barang yang diincar. Hal tersebut akhirnya mendorong banyak brand ternama dan desainer kelas dunia ikut memproduksi masker dengan model dan motif yang berbeda. Tak heran, laporan The Lyst Index 2020 menempatkan masker sebagai salah satu tren fashion yang menantang tahun ini.

Lalu, bagaimana dengan tahun mendatang? Los Angeles Times, memberitakan, pandemi ternyata masih memengaruhi tren fashion 2021. Pasalnya, kegiatan work from home (WFH) masih akan mendominasi bagi setiap pekerja, tak terkecuali wanita. Sejumlah brand pun akan fokus mengeluarkan setelan yang bisa digunakan saat bekerja dari rumah.



PAKAIAN KASUAL DENGAN BLAZER

Salah satu look dari koleksi Coperni menggabungkan atasan dan celana pendek casual khas rumahan dengan blazer formal. Dengan setelan seperti ini, pekerja wanita akan lebih leluasa bekerja sambil beraktivitas di dalam rumah. Blazer yang dikenakan pun tak harus dipakai sepanjang hari, tetapi hanya pada saat pertemuan virtual dengan bos atau klien. Sebagai tambahan aksesoris, kamu bisa pula memakai jam tangan wanita untuk terlihat lebih profesional saat bekerja.



PAKAIAN BERBAHAN RAJUTAN (CROCHET)

Selain Coperni, brand asal Negeri Paman Sam, Eckhaus Latta, juga tak mau ketinggalan mengeluarkan koleksi untuk 2021. Dengan mengedepankan kenyamanan dan fungsi pakaian, Eckhaus Latta lebih menonjolkan look casual dengan penggunaan bahan rajutan (crochet). Bahan rajutan ini dipilih karena bisa digunakan baik di dalam rumah atau saat berbelanja bahan makanan di luar. Untuk tampilan lebih kece dan klop, kamu bisa pula memakai tas wanita dengan bahan rajutan.



SEPATU SNEAKER

Untuk alas kaki, sepatu wanita yang tampaknya masih menjadi tren pada 2021 adalah sneaker karena kemudahan penggunaan dan perawatan. Selain itu, tren berolahraga juga turut memengaruhi sneaker sebagai sepatu andalan. Terkait dengan maraknya penggunaan sneaker di kalangan masyarakat, banyak brand yang mengeluarkan edisi khusus dalam menyambut 2021. Desain sneaker Fendi Flow menjadi salah satunya. (ist)

33 Ribu Jemaah (dari hal 1)

Meski pandemi Covid-19 belum usai, namun Arab Saudi kini kembali membuka kedatangan jemaah umrah dari luar negaranya mulai 1 November 2020 mendatang. Namun, jemaah yang diperbolehkan datang beribadah dibatasi hanya untuk yang berusia 18-50 tahun saja. Sesuai data, aka nada sekitar 33 ribu jemaah Indonesia yang telah terdaftar tidak bisa berangkat akibat aturan baru tersebut.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menjelaskan, akibat kebijakan itu, hanya 44 persen atau 26 ribu saja jemaah asal Indonesia yang sudah terdaftar yang bisa melanjutkan perjalanan. Sisanya, terpaksa menunda perjalanan ibadah umrah karena berusia di bawah 18 tahun atau di atas 50 tahun.

"Ada 26.328 jemaah atau 44 persen dari mereka yang sudah mendapat nomor registrasi yang berusia 18 sampai 50 tahun. Mereka masuk dalam kriteria yang dipersyaratkan Saudi untuk berangkat umrah di masa pandemi," tutur Arfi dalam keterangannya, Kamis (29/10).

"Dari jumlah itu, sudah ada 21.418 jemaah yang sudah dapat nomor pors. Dari 21 ribu itu, 9.509 orang sudah lunas dan mendapatkan visa serta tiket keberangkatan," imbuhnya.

Sementara itu, 2.601 atau sekitar 4 persen jemaah yang terdaftar tidak bisa melanjutkan ibadah umrah karena masih di bawah 18 tahun. Sedangkan 52 persen sisanya, atau 30.828 jemaah, juga harus batal berangkat umrah karena sudah berusia di atas 50 tahun. Sehingga, total jemaah yang batal berangkat adalah 33.429.

Arfi menuturkan, khusus untuk jemaah yang masih tertunda keberangkatannya namun sudah memenuhi kriteria persyaratan, akan diutamakan untuk berangkat jika Saudi sudah memberikan izin. Selain batas usia, ada sejumlah syarat lainnya yang harus dipenuhi calon jemaah, termasuk masalah protokol kesehatan.

"Kami tengah memfinalkan rancangan Keputusan Menteri Agama atau KMA Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi. Di situ mengatur juga persyaratan jemaah umrah. Tentu kami memperhatikan ketentuan Arab Saudi, termasuk juga ketentuan yang ditetapkan Kemenkes, Kemenkum HAM, Kemenhub, dan Satgas Covid-19 RI," jelas Arfi. "Bagi jemaah yang sudah mendaftar namun belum memenuhi syarat keberangkatan, dimohon bersabar, menunda keberangkatannya hingga pandemi berakhir," tutupnya.

Sementara itu, di Arab Saudi pasien corona masih bertambah. Tercatat 416 kasus Covid-19 hari baru, sehingga jumlah total kasus yang dikonfirmasi menjadi 346.047, kata Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Dilansir dari Argam, pemulihan pasien Covid-19 mencapai 433, meningkatkan jumlah total kasus yang pulih menjadi 332.550 (96% dari total kasus Covid-19).

Kerajaan Arab Saudi melaporkan 19

kematian baru, dengan jumlah kematian mencapai 5.348. Kasus aktif berjumlah 8.149, dimana 769 kasus kritis. Madinah melaporkan jumlah kasus Covid-19 tertinggi yaitu 75, diikuti oleh Riyadh (49) dan Makkah (47). Kerajaan melakukan 58.561 tes baru, sehingga jumlah total tes menjadi 7,89 juta.

Kontradiksi Soal 'di Rumah Saja'

Sementara di tanah air, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono mengaku putus asa soal penyebaran kasus corona (Covid-19) di Indonesia yang diprediksi akan kembali mengalami ledakan akibat libur panjang selama lima hari hingga 1 November mendatang.

Pandu menyebut kebijakan pemerintah untuk menekan mobilitas warga jelang libur panjang justru saling kontradiktif. Misalnya, kata dia, imbauan Presiden atau menteri agar warga tetap diam di rumah justru kontradiksi dengan kebijakan tiket pesawat murah.

"Problemnya itu disadari. Presiden mengimbau. Semua mengimbau. Tapi di lain pihak menteri-menterinya memberikan kemudahan untuk imbauan itu tidak dipatuhi. Jadi, imbauan presiden disabotase oleh menterinya sendiri," kata Pandu Kamis (29/10).

Pandu mengaku saat ini tak memiliki saran apapun dan menyerahkan semuanya pemerintah terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Namun, ia hanya mewanti-wanti agar potensi ledakan kasus Covid-19 nantinya bisa diiringi persiapan fasilitas yang memadai. Ia memastikan kasus Covid-19 akan mengalami ledakan pascalibur panjang. Apalagi, pemerintah sejauh ini kata dia hanya melakukan imbauan untuk menekan mobilitas warga. Upaya itu, menurut dia jelas tidak cukup. Sebab,

imbau itu justru diiringi kebijakan yang saling berkontradiksi.

Berkaca dari sejumlah peristiwa sebelumnya, Pandu menyebut momen liburan dipastikan bakal diiringi dengan lonjakan kasus Covid-19 yang eksponensial. Saat libur pertengahan September lalu misalnya, Bali mengalami lonjakan kasus Covid-19 mencapai 100 persen. Penambahan itu, lanjut Pandu, diiringi dengan penambahan kasus corona di 9 provinsi, sebelum kemudian Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk mengatasi masalah tersebut.

Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyarankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar terus meningkatkan strategi 3T-Tracing (penelusuran, testing (pengujian), dan treatment (perawatan)- untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

Upaya itu, kata Dicky, harus terus dilakukan hingga angka positivity rate (rasio positif) mencapai angka atau di bawah 5 persen. Dia menyebut, kasus suspek di Indonesia saat ini terus mengalami kesenjangan dari jumlah kasus positif dengan angka mencapai lebih dari 160 ribu.

Dicky mencatat, ledakan kasus mencapai 80 persen pada dua momen libur panjang sebelumnya, yakni 23 Mei - 17 Agustus lalu. Kenaikan itu, kata dia, terutama terlihat sebulan pascamomentum libur.

Ledakan, lanjutnya, juga akan terjadi pada momen liburan panjang kali ini. Bahkan, ia memprediksi persentase kenaikan kasus buntut libur panjang saat ini mencapai 75-85 persen, dengan asumsi tidak ada perubahan dalam strategi 3T dan 3M. "Ini bahaya sekali. Ketika terjadi ledakan (kasus Covid-19), akan menimpa kapasitas fasilitas kesehatan. Kondisinya akan sangat chaos," kata dia. (ist,ins)



IMBAS CORONA: 6 BPR KEOK, BANK UMUM DIKLAIM AMAN

Jakarta- World Health Organization (WHO) mengungkapkan beberapa negara kemungkinan perlu menutup lagi bisnis yang tak penting untuk mengatasi pemburukan infeksi virus corona Covid-19. Sebab, saat ini di beberapa wilayah wabah corona menggila lagi.

Bahkan, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan tidak akan lagi mengendalikan pandemi virus corona. Mereka kini tengah fokus soal pengadaan vaksin untuk virus tersebut.

Namun menurut WHO, pemimpin negara, terutama Eropa dan Amerika, perlu memberlakukan langkah-langkah mitigasi yang lebih ketat lagi. "Kita berada jauh di belakang virus ini," ujar Executive Director Health Emergencies Program WHO Mike Ryan, dikutip Selasa (27/10). "Kita harus mengatasi virus ini, dan [itu] mungkin membutuhkan pengorbanan dari banyak, banyak orang dalam hal kehidupan pribadi mereka."

Terpisah, Kepala Staf Gedung Putih, Mark Meadows mengatakan, "Kami tidak akan mengendalikan pandemi. Kami akan mengontrol fakta bahwa kami mendapatkan vaksin, terapi dan area mitigasi lainnya," katanya.

Ungkapan tersebut mendapat respons dari berbagai pihak, salah satunya adalah Profesor dan Direktur Pusat Pembangunan

Berkelanjutan di Universitas Columbia, Jeffrey D. Sachs. Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah menyerah dan meninggalkan pertempuran melawan corona. "Saya yakin dia akan dikenang sebagai kegagalan presiden terbesar dalam sejarah Amerika," tulis Jeffrey.

Menurut Jeffrey, Trump mungkin sudah menyerah menangani pandemi corona, namun sebagian besar orang Amerika Serikat belum. "Kami siap memakai masker, untuk diuji, menjaga jarak sosial, mengisolasi diri jika diperlukan, menjaga keamanan kantor dan toko kami," ujarnya.

Hingga hari ini Amerika Serikat masih menjadi negara dengan jumlah kasus positif corona tertinggi di dunia. Menilik data dari website Worldometer yang diakses Selasa, kasus virus corona di AS nyaris menyentuh angka 9 juta dan 231.045 kematian.

Ahli penyakit menular Anthony Fauci mendesak pemerintahan Trump untuk menetapkan kebijakan menggunakan masker di seluruh AS. Fauci menilai kebijakan ini sangat penting untuk mencegah penyebaran Covid-19 di AS yang terus memburuk.

Kematian RI Tinggi

Meski penambahan kasus positif Corona mingguan menurun, angka kematian di

Indonesia akibat Corona pekan ini tinggi. Angka kematian pekan ini naik 18 persen dari pekan sebelumnya. Untuk diketahui, penurunan kasus di Indonesia pekan ini mencapai 4,5 persen secara nasional.

"Jumlah kematian pada pekan ini mengalami kenaikan dengan angka yang lebih besar dari pekan sebelumnya. Pekan ini terjadi peningkatan sebesar 18 persen untuk penambahan kematian mingguan," ungkap juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Selasa (27/10).

Dikatakannya, untuk Jawa Tengah masih bertahan pada 5 besar penambahan kematian mingguan tertinggi seperti di pekan-pekan sebelumnya. "Perlu perhatian khusus pada provinsi yang pekan ini masuk dalam 5 besar kenaikan kasus kematian tertinggi, yaitu Jawa Barat naik 89, Sumatera Barat naik 22, Jawa Tengah naik 16, Kepulauan Riau naik 10, dan Nusa Tenggara Barat naik 7," jelas Wiku.

Sementara itu, persentase kasus kematian tertinggi pekan ini ditempati Jawa Timur 7,24 persen, Nusa Tenggara Barat 5,64 persen, Sumatera Selatan 5,47 persen, Jawa Tengah 5,44 persen, dan Bengkulu 5,02 persen. Wiku meminta 5 provinsi memperbanyak testing dan meningkatkan angka kesembuhan. (ist)

BANK KUAT VERSI ICONOMICS TOP BANK AWARD 2020

KATEGORI BUKU 4 DENGAN NILAI PLATINUM.

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Central Asia Tbk
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk

KATEGORI BUKU 3 DENGAN NILAI PLATINUM

- PT BPD Jawa Timur Tbk
- PT Bank BNI Syariah
- PT Bank DBS Indonesia
- PT Bank Mega Tbk
- PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
- PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
- PT Bank BTPN Tbk
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank Syariah Mandiri
- PT Bank KEB Hana Indonesia

KATEGORI BUKU 3 DENGAN NILAI GOLD

- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Bank DKI

- PT BPD Jawa Tengah
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- PT Bank Permata Tbk
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Bank Mizuho Indonesia
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank ICBC Indonesia
- PT Bank Bukopin Tbk

KATEGORI BUKU 3 DENGAN NILAI SILVER

- PT Bank Mayapada Internasional Tbk
- Kategori BUKU 2 dengan nilai Platinum
- PT Bank BRI Syariah Tbk
- PT Bank Mega Syariah
- PT BPD Bali
- PT BPD Jambi
- PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
- PT Bank Amar Indonesia Tbk
- PT Mandiri Taspen
- PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
- PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo
- PT BPD Sumatera Utara
- PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
- PT BPD Papua

- PT Bank Mestika Dharma Tbk
- PT Bank INA Perdana Tbk
- Kategori BUKU 2 dengan nilai Gold
- PT Bank BCA Syariah
- PT BPD Kalimantan Barat
- PT Bank Capital Indonesia Tbk
- PT Bank CTBC Indonesia
- PT Bank OKE Indonesia
- PT Bank Multiarta Sentosa

KATEGORI BUKU 1 DENGAN NILAI PLATINUM

- PT BPD Bengkulu
- PT BPD Lampung
- Kategori BUKU 1 dengan nilai Gold
- PT Bank MNC Internasional Tbk

